

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi. (2022). *Governance dan Kebijakan Publik*. Makassar:Unhas Press.
- Anggraini Isti. (2022). *Peran Pemimpin dalam membangun manajemen kinerja berkualitas di Lembaga Baznas Kabupaten Lampung Utara*. Lampung:Repository Raden Intan Lampung
- Antaraneews.com. (2019). *POLRI Beri Pendampingan kepada orang tua korban penculikan anak*. Diakses melalui laman: <https://www.antaraneews.com/berita/3334215/rs-polri-beri-pendampingan-kepada-orang-tua-korban-penculikan-anak>. Diakses pada 5 Oktober 2023.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Publikasi Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah*. Diakses melalui laman: <https://www.bappenas.go.id/> Diakses pada 24 Desember 2023.
- Butcher John R. (2016). *The three sector solution delivering public policy in collaboration with not for profits a business*. Canberra: *Australian National University Press*.
- Bogorkab.go.id. (2013). *Apa itu Musrenbang RKPD?*. Diakses melalui laman: <https://bogorkab.go.id/post/detail/apa-itu-musrenbang-rkpd>. Diakses 28 Januari 2023
- Cock, Wendell, (1996). *Competitive contracting for more effective and efficient Government*. Congressional Testimony before the Subcommittee on Civil Service-Committee on Government Reform and Oversight:United States House of Representative.
- Commision of the European Communities (2004). *Green Paper on Public-Private Partnership and Community Law on Public Contracts and Concessions*. Brusel:Commision of the European Communities.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta:*Gadjahmada University Press*.
- Crosby, Philip B. (1986). *Quality is Free, The Art of Making Quality Certain*. New York:McGraw-Hill Book Co.
- Cxomedia.id (2023). *Berbagai alasan korban kekerasan seksual enggan melapor*. Diakses melalui laman:<https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20230616160645-55-178922/berbagai-alasan-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor>. Diakses pada 10 Oktober 2023.
- Deming W.Edwards. (1986). *Out Of the Crisis*. Inggris:Cambridge University Press.
- Dwiyanto. Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Gadjahmada University Press.
- Evoc.org.uk. (2012). *Public Social Partnerships-People at the heart*. Diakses melalui laman:<https://www.evoc.org.uk/blog/public-social-partnerships-people-at-the-heart/>. Diakses Pada 5 Oktober 2023.
- Fitriani. Rini. (2016). *Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2(2),50-58.
- Fatmawati. F. (2011). *Kemitraan dalam Pelayanan Publik:sebuah penjelajahan teoritik*. Otoritas *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(2), 91-101.
- Fandel. Gunter, Giese Anke, Mohn Brigitte. (2012). *Measuring Synergy Effects of a public social private partnership (PSPP) Project*. *International Journal of Production Economics*.14(1), 815-824.

- Glasbergen, Pieter, Frank Biermann, and Arthur Mol. (2007). *Partnerships, Governance and Sustainable Development. Reflections on Theory and Practice*. Cheltenham:Edward Elgar.
- Gitsham, Mattew & Page, Nadien (2014) Designing effective multy stakeholder collaborative Platform:Learning from the experience of the UN Global compact LEAD initiative. *SAM Advanced management journal autumn*
- Gramedia.com. (2023) Pengertian Perlindungan. Diakses melalui laman: <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>. Diakses pada 18 Oktober 2023.
- Jamaluddin, Ahmad. (2021). Legal Protection of Child Victi of Sexual Violence. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. Universitas Islam Nusantara. 3(2),1-10.
- Jatmiko. Gunawan, Emilia Susanti, dan Firganefi. (2022) *Konstruksi Kebijakan perlindungan terhadap Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis community policing*. Laporan Penelitian Dasar. Lampung:Universitas Lampung.
- Katadata.co.id. (2023). *Kejahatan dan kekerasan Anak Masih tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi*. Diakses melalui laman: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>. Diakses Pada 5 Oktober 2023.
- Kemenppa.go.id. (2023). *Data Kasus Persebaran Kekerasan, Menurut Provinsi Tahun 2023*. Diakses melalui laman: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 5 Oktober 2023
- Kumparan.com. (2023). *Pengertian public dalam sosiologi*. Diakses melalui laman:<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-pengertian-publik-dalam-sosiologi-dan-contohnya-20xT6GJpiOP>. Diakses pada 15 Oktober 2023
- LAKIP. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar*.
- Leonhardt, Manfred, BrigitteKukovetz dan Martina Haas (2007). *Public Social Private Partnership*. FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Graz. Dalam <http://docplayer.org/26719364-Public-social-private-partnership-pspp-modell.html>.
- Liputan 6.com. (2015) *Orangtua penelantar anak*. Diakses pada 5 Oktober 2023. Diakses melalui laman: <https://www.liputan6.com/news/read/2237304/orangtua-penelantar-anak-diperiksa-di-rs-polri>
- Makassar.go.id. (2023). *Kondisi Demografis Kota Makassar*. Diakses melalui laman: <https://makassarkota.go.id/geografis-2/>. Diakses pada 24 Desember 2023.
- Malayu Hasibuan. (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta:PT Toko Gunung Agung
- Mary, Ismowati. (2016). Kajian Urgensi Public Private Partnership di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi:Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*. 9(2),141-149.
- Mahmudi. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*.9(1),53-67.

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Mazzei Micaela, Franscesca Calo, Michael Roy dan Simon Teasdale. (2018). *Report-to date-of the strategic Public Social Partnership (PSP) Model in Scotland*. (2018). Scottish Government:Glasgow Caledonian University.
- Moleong. Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta:Yustisia.
- Nasution. (1996) *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Bandung:Tarsito Bandung.
- OECD (1997). *Best Practice Guidelines for Contracting out Government service*. PUMA Policy Brief No 2.
- Osborne, Stephen P. (2010). *The New Public Governance?:Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance*. London, United Kingdom:Routledge.
- Parasuraman. A, Zeithalm, V., Berry L. (1998). Servqual:A multiple item scale for measuring perceptions of service quality. *Journal of Retailing*. Volume 63 Special Issue, pp. 33-44.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*
- Pemerintah Republik Indonesia (2012) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *tentang Penggunaan dan atau pemanfaatan hasil kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara*
- Pemerintah Republik Indonesia (2006) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 *tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) *tentang Pemerintah Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 *tentang Kementerian Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 *tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara*.
- Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 *tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia (1848) Kitab Undang-undang Hukum PERDATA
- Peraturan Walikota Makassar (2016) Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)*
- Peraturan Walikota Makassar (2015) Nomor 30 Tahun 2015 *tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*
- Peraturan Walikota Makassar (2016) Nomor 91 tahun 2016 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.

- Perempuan. Komnas (2021). *Data Wawancara dengan Komnas Perempuan Tahun 2016-2020*.
- Putra. Kelana Arif. (2014). *Sejarah Perkembangan Public Private Partnership di Indonesia*. Diakses melalui laman: <https://id.scribd.com/doc/239261727/Sejarah-Dan-Perkembangan-Public-Private-Partnership>. Diakses pada 5 Oktober 2023.
- Putzel. Louis, Paolo omar cerutti, Yustina Artati dan Alice Kelly. (2014). Policy options for Improved Integration of Domestic timber markets under the Voluntary Partnership Agreement (VPA) regime. *Center for International Forestry Research (CIFOR) Policy Brief*.
- Ramadhani. Citra & Madani Muhlis. (2022). Analisis Kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. 3(6),1851-1831.
- Republika.id. (2021). *Kasus kekerasan terhadap anak melonjak*. Diakses melalui laman: <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>. Diakses pada 19 Oktober 2023.
- Sagala Syaiful (2018). *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Jakarta:Prenada Media Group
- Setiawan, Tomi & Warsa Nosia (2017). Public Social Partnership dalam penyediaan infrastruktur publik. *Jurnal Borneo Administrator*. 13(3),203-220.
- Satriawan, Alfiana, Hafizh Fasya, Ayu Friska Amelia, Andi Ahmad Yani (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 3(1),37-48
- Silalahi Jenica Ricca. (2011). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pekanbaru:Universitas Republik Indonesia:Pekan Baru.
- Savas, E.S. (2000). *Privatization and Public-Private Partnership*. Seven Bridge Press:University of New York.
- Seitanidi, M. May dan, Crane, Andrew (2014). *Social Partnership and Responsible Business A research handbook*.New York: Routledge.
- Soekanto Soejono. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Soekidjo. Notoatmodjo. (2004). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta:Rineka Cipta
- Tjiptono. (2007). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Thompson. John L. (2001). *Strategic Management*, 3<sup>rd</sup> ed. London:Thompson Learning.
- Windasari. Fitri. (2021) *Kemitraan antara Pemerintah daerah dengan non Government dalam penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Pringsewu*. Lampung:Digital Repository UNILA

## I. Biodata Penulis

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### Identitas Diri

Nama Lengkap : Nur Fauzi Zaahirah  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 15 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kompleks Perdosa Unhas Tamalanrea Blok GB 48  
Email : [nurfauzizaahirah@gmail.com](mailto:nurfauzizaahirah@gmail.com)


#### Riwayat Pendidikan

- 2008-2014 : SD Inpres Kampus Unhas 1
- 2014-2017 : SMP Negeri 12 Makassar
- 2017-2020 : SMA Negeri 21 Makassar
- 2020-2024 : S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

#### Riwayat Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP Unhas
- Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (UKM KPI) Unhas
- Kampus Gagasan

## Surat Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos 90111  
Telepon (0411) 3633733, Faksimile (0411) 3633733  
Laman ; dp3a.makassarkota.go.id Pos-et ; dppakotamakassar@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070/085/DPPPA/I/2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUR FAUZI ZAAHIRAH  
NIM/ Jurusan : E011201037/Illmu Administrasi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/UNHAS  
Alamat : Jl. P.Kemerdekaan Km.10 Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 01 Desember 2023 s/d 01 Februari 2024 dengan Judul :

**“PUBLIC SOCIAL PARTNERSHIP DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM  
PERLINDUNGAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA SHELTER RUMAH  
AMAN PATTINGALLOAN DI KOTA MAKASSAR”.**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 22 Januari 2024  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**  
  
**ACHI SOLEMAN, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19770831 199511 2 001



Kantor DPPAPPKB Sulawesi Selatan



Sekretariat Shelter Pattingalloan



Sekretariat shelter Pattingalloan



Polrestabes Makassar  
Jl Ahmad Yani



Wawancara bersama Staff DPPA



Wawancara bersama KABID  
DPPA&KB Sulawesi Selatan



Wawancara bersama korban



wawancara bersama Kadis  
DPPA&KB Sulawesi Selatan





Wawancara bersama Staff DPPA  
Kota Makassar



Wawancara bersama Kabid  
Perlindungan Perempuan



Wawancara bersama Kepala Unit Polresta Ji Ahmad Yani, Kota Makassar



Wawancara bersama Pengelola shelter



Wawancara bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



Wawancara bersama Psikolog anak



Wawancara bersama Guru SAPD CSR Pertamina



Wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak